LAPORAN KINERJA INSTANSI
BIRO PEREKONOMIAN dan PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga sedapat mungkin menyajikan analisis atas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Berbagai data kinerja disajikan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja yang dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban diatas, pada tahun 2025 kami telah menyusun **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025** dan alhamdulillah kami telah menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Tanjungpinang, Januari 2026

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. H. Zulhendri, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196606111986021004

Daftar Isi

Hal

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Ikhtisar Eksekutif iii

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 2

1.3 Struktur Organisasi 4

1.4 Sistematika Penyajian 16

BAB II Perencanaan Kinerja 17

BAB III Akuntabilitas Kinerja 21

2.1 Pengukuran Capaian Kinerja 16

2.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 17

BAB IV Penutup 32

Lampiran-Lampiran 36

Lampiran I Perjanjian Kinerja Perubahan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

Lampiran II Rekapitulasi Laporan Realisasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

Ikhtisar Eksekutif

Berdasarkan Pasal 2; Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 19 ayat (1), (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 21; Pasal 28 ayat (1) dan (2); pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Lampiran II dan Lampiran III pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi amanat tersebut Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja melalui 3 (tiga) program dengan hasil capaian yang rata-rata sudah memenuhi target sehingga hal ini menunjukkan keberhasilan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 serta dalam mewujudkan visi dan misi Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan visi maupun misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Target kinerja pada Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun anggaran 2025 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Anggaran total sebelum mengalami kebijakan efisiensi pada DPA semula adalah sebesar Rp2.835.360.682,- dengan 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, selama tahun 2025 Biro Perekonomian dan Pembangunan mengalami beberapa kali perubahan/refocusing/efisiensi anggaran, terakhir setelah APBD-Perubahan menjadi Rp1.696.019.757,25 (BL) dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.578.967.948,- atau sebesar 93,10%. (BL).

Hal ini menunjukan penyerapan anggaran tahun 2025 telah maksimal dikarenakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 setelah mengalami perubahan pada APBD Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

BAB I Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistim dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi, misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dalam penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka Biro Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga LKjIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 diharapkan dapat:

- mendorong Biro Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan;
- menumbuhkan profesionalitas kerja terhadap Biro Perekonomian dan Pembangunan di dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah;
- sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perekonomian dan Pembangunan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2.1 FUNGSI

Biro Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian. Biro Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 TUGAS POKOK

Biro Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Biro, untuk menyelenggarakan fungsi Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan mempunyai rincian tugas:

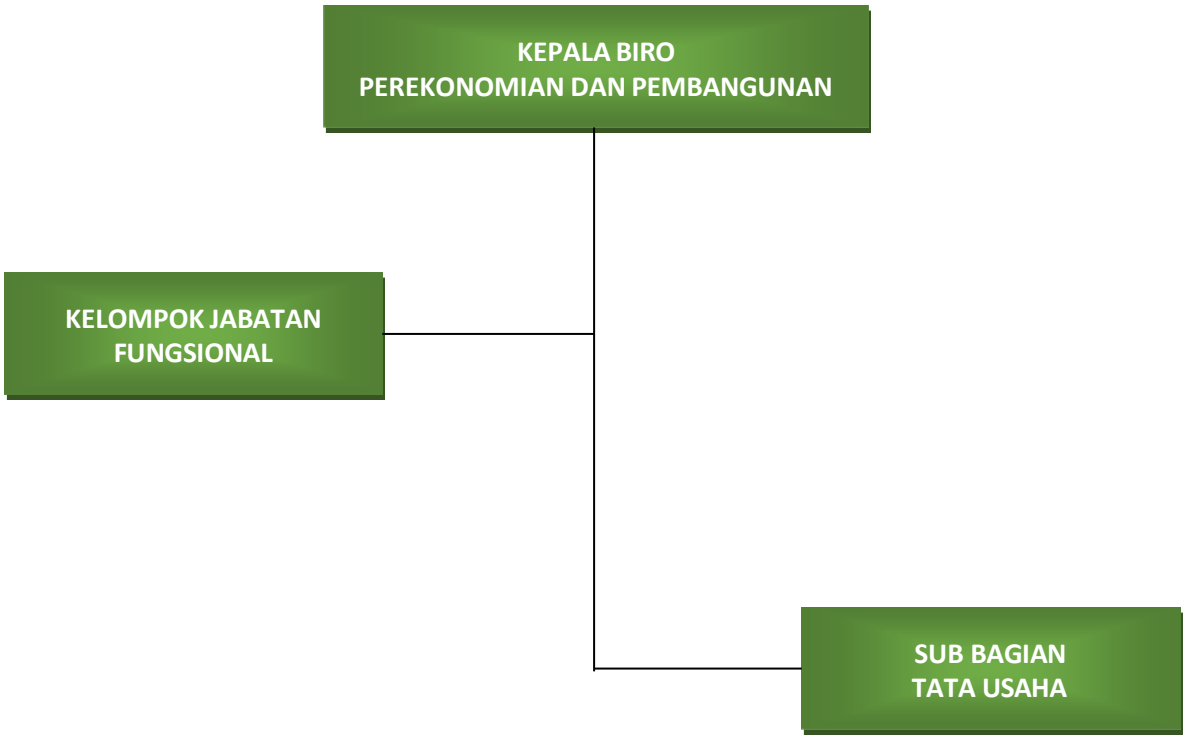
a. merumuskan program kerja dilingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Perekonomiandan Pembangunan;
c. membina bawahan di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan;
d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Biro Perekonomian Dan Pembangunan;
e. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;
f. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam, dan BUMD;
g. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Administrasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan;
i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Biro Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah Biro Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

Sub Bagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Biro Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



1. **Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha :**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dibidang administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi umum, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup biro, pemeliharaan perlengkapan biro, pembinaan Pegawai ASN.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
e. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
f. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
g. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ dan LPPD lingkup biro;
j. melaksanakan pengolahan bahan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
k. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
l. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
m. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN;
n. melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;

o. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah dilingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
p. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah dilingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
r. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut beragam menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Kondisi yang beragam tersebut saling bekerjasama guna menghasilkan kinerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Biro Perekonomian dan Pembangunan. Gambaran kondisi pegawai Biro Perekeonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

Jumlah pegawai di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan sampai dengan 31 Desember 2025, berjumlah 55 orang yang terdiri dari 29 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 24 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 2 Pegawai *Outsourching*. Gambaran Jumlah PNS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.1
Daftar Urut Kepangkatan

No.	NAMA LENGKAP	NIP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PANGKAT – GOL	PANGKAT – TMT	NAMA JABATAN
1	Dr. H. ZULHENDRI, M.Si	196606111986021004	MIDAI	11/06/1966	IV/d	01/10/ 2018	KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2	MUHAMMAD YOSLI	197405122000031005	TANJUNGPINANG	12/05/1974	IV/c	01/04/2021	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
3	NURHAZAN, SE	196706061988102002	TANJUNGPINANG	06/06/1967	IV/b	01/10/2018	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
4	ISRA GIGANTARA, S.Sos., M.Si	197209052002121007	ACEH TIMUR	05/09/1972	IV/b	01/10/2023	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
5	FERY TRIASTUTI, SE., MM	198102052005022007	TANJUNGPINANG	05/02/1981	IV/b	01/10/2023	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
6	FAKHRULLIZAT, S.Sos	197304231992031001	TANJUNG BALAI KARIMUN	23/04/1973	IV/a	01/10/2013	KASUBBAG TATA USAHA
7	SLAMET BUDI UTOMO, S.Sos	196806141999031008	KEPULAUAN RIAU	14/06/1968	III/d	01/10/2009	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
8	SAID FAIZAL AZAN, SE	197506012002121011	KIJANG	01/06/1975	III/d	01/10/2011	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
9	RIANTO, S.Sos	196908021990031009	TANJUNGPINANG	02/08/1969	III/d	01/04/2013	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
10	EKO CAKRA IWANTO , SE	196903192003121000	JAKARTA	19/03/1969	III/d	01/04/2019	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
11	ANANG ARIYANSYAH, ST	197512072005021005	PEKANBARU	07/12/1975	III/d	01/10/2014	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
12	DARMAWATI, S.Sos	197304012001122001	GP. ULEE GLE	01/04/1973	III/d	01/04/2017	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
13	ZUL FAHMI, SE	197502092007011013	ALAI KUNDUR	09/02/1975	III/d	01/10/2019	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
14	TENGKU ASRADI LINGGA, S.Kom	198503252006041010	DUMAI	23/5/1985	III/d	01/04/2022	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
15	EUS KARLINA, SE	197612262009032002	TANJUNGPINANG	26/12/1976	III/d	01/04/2021	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
16	MUHAMMAD REYHAN AZZAHARI, S.STP	199305162015071001	TANJUNGPINANG	16/06/1993	III/d	01/10/2023	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

No.	NAMA LENGKAP	NIP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PANGKAT - GOL	PANGKAT – TMT	NAMA JABATAN
17	DESKA KURNIAWAN, SE	198306022014041001	TANJUNGPINANG	02/06/1983	III/d	01/04/2024	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
18	LIDYA SARI DEWI, SE	198112232010012008	PERANAP	23/12/1981	III/c	01/04/2021	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
19	NISSE PUTRI ANNE, SE	198502262011012005	TANJUNGPINANG	26/02/1985	III/c	01/04/2019	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
20	MUHAMMAD RIDWAN, A.Md	197204222006041004	TANJUNGPINANG	22/04/1972	III/c	01/04/2023	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
21	DIYAN WAHYU HARTATY S, A.Md	197411262006042011	TANJUNGPINANG	26/11/1974	III/c	01/04/2023	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
22	DIAN SARI KESUMA, S.Si., M.Si	198505142015032000	MEDAN	14/05/1985	III/c	01/04/2023	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
23	NURDENANINGSIH, SE	198303262003122004	TANJUNGPINANG	28/03/1983	III/c	01/04/2022	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
24	RENI SULISTRIANI, A.Md	198704052010012023	BELAKANG PADANG	05/04/1987	III/b	01/04/2018	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
25	SAID MUSTAFA, S.I.P	197807272006041025	SEDANAU	27/07/1978	III/a	01/04/2021	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
26	RENDY ROBERT KASTANYA, S.Si	199407122023031009	BATAM	12/07/1994	III/a	01/03/2023	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
27	IMRAN BUNGARAN INGELYON GULTOM, SIP	199601052020081001	BATAM	05/01/1996	III/b	08/07/2024	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
28	ARI ARVIANTI, A.Md	198009242015032001	TANJUNGPINANG	24/09/1980	III/a	01/04/2023	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
29	ALIF FAJAR MELPA WIJAYA	200306152025101001	BATAM	15/06/2003	III/a	01/10/2025	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Tabel 1.4.2
Komposisi PNS Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Struktur Organisasi	Jenis Kelamin (Orang)		Total (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	18	11	29

Tabel 1.4.3
Komposisi PNS Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Golongan

No.	Struktur Organisasi	Golongan			
		I	II	III	IV
1	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	23	6

Tabel 1.4.4
Komposisi PNS Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Eselon

No.	Struktur Organisasi	Eselon			
		I	II	III	IV
1	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	1	-	1

Tabel 1.4.5
Komposisi PNS Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Struktur Organisasi	Jenjang Pendidikan						
		SD	SMP	SMA	D1-D3	D4/S1	S2	S3
1	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	4	20	4	1

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistemati kasebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2025.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
2. Program dan Kegiatan Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri Tahun 2025;
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2025;
4. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2025.

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator	Target	Penanggung jawab
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	100%	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan	100%	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

2.2. Program dan Kegiatan Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Biro Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2025

NO.	PROGRAM		KEGIATAN / SUB KEGIATAN
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***1***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
		1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		3	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		4	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		5	***Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan***
		1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***1***	***Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian***
		1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
		2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
		2	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**
		1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

		3	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**
		1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
		2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
		3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
		4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
3	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**1**	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**
		1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
		2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
		2	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**
		1	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kewajiban penyusunan Perjanjian Kinerja OPD didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah saling berhubungan dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 diperlukan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Derah Provinsi Kepulauan Riau.

Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang mencakup 1 Sasaran Strategis dengan 2 Indikator sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan
Setda Provinsi Kepri Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	100%
		Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan	100%

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2025 memuat hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan kinerja. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 dengan targetnya.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Target) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X > 100$	:	Sangat Baik
$70 < X < 100$	:	Baik
$55 < X < 75$	:	Cukup Baik
$X < 55$	:	Kurang Baik

Target capaian kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2025 yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	100 %	100%	100%
		Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing- masing kelompok indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, akan dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik

Sasaran Strategis dengan indikator kinerja ini dicapai melalui Program Perekonomian dan Pembangunan

Untuk mengukur Capaian Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan dengan membandingkan Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk mengukur Realisasi Capaian Kinerja menggunakan beberapa formula :

$$\frac{\textit{Jumlah Rekomendasi dan Kebijakan bidang Perekonomian yang diusulkan menjadi kebijakan}}{\textit{Jumlah Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang disusun}}$$

Capaian Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran Strategis dengan Indikator 1
Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	7	7	100%

Berdasarkan tabel di atas Persentase Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan merupakan indikator utama untuk mengukur apakah Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan sudah sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Indikator ini menilai jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi Kebijakan. Capaian Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan pada Program Perekonomian dan Pembangunan berjumlah 7 Rekomendasi dan teraealisasi sebanyak 7 (tujuh) Rekomendasi, hal ini disebabkan adanya Penyesuain Anggaran pada APBD Perubahan pada Program dan Kegaiatan tersebut.

Dengan demikian, Capaian Kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal masuk kategori **Baik**

Tabel 3.3

Ringkasan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Kondisi Awal Tahun 2025 Sasaran Strategis dengan Indikator 1

NO	Indikator Kinerja	Kondisi 2025 (%)	Tahun 2025	
			Target	Realisasi
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	100%	7	7

Realisasi indikator kinerja Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dihasilkan Tabel 3.3 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan Biro Perekonomian dan Pembangunan pada tahun sebelumnya telah merubah indikator kinerja pada RPJMD tahun 2021. Pada tahun 2024 berdasarkan RENSTRA 2021-2026, namun

pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, sehingga Sekretariat Daerah menyesuaikan Target Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Adapun Rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang di hasilkan
Untuk Mencapai Sasaran Startegis
Tahun 2024

No.	Ringkasan Rekomendasi Kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti Penerapannya	Tanggal Rekomendasi
1	SURAT EDARAN GUBERNUR KEPADA BUPATI/WALI KOTA SELAKU TPID KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR: B/100.3.4/11/B.EKBANG-SET/2025 TENTANG PENGENDALIAN INFLASI MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1445 H / 2025 M	24 Maret 2025
2	SURAT EDARAN GUBERNUR KEPADA BUPATI/WALI KOTA SELAKU TPID KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR: B/100.3.4/63/B.EKBANG-SET/2025 TENTANG PENGENDALIAN INFLASI MOMENTUM NATAL TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU 2026	17 Desember 2025
3	USULAN KUOTA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU (JBT) DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN (JBKP) UNTUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN NOMOR SURAT: B/500.10.10/1434/B.EKBANG-SET/2025	22 Desember 2024
4	BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) UNTUK PT. PEMBANGUNAN KEPRI DAN PELABUHAN KEPRI	10 September 2025
5	BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) UNTUK PT. PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI	10 September 2025
6	LAPORAN HASIL PENDATAAN DAN PENILAIAN SERTA KAJIAN INVESTASI (TIM AKUISISI ANAK PERUSAHAAN DARI INDUK PT. PEMBANGUNAN KEPRI (PERSERODA) KE PT. ENERGI KEPRI (PERSERODA) YANG TERDIRI DARI PT. PEMBANGUNAN KEPRI NORTH WEST NATUNA DAN PT. ENERGI BLOK DUYUNG	31 Oktober 2025

No.	Ringkasan Rekomendasi Kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti Penerapannya	Tanggal Rekomendasi
7	SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1158 TAHUN 2025 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	30 Oktober 2025

Sasaran Strategis dengan indikator kinerja Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan dapat dicapai melalui Program Kebijakan Administrasi Pembangunan. Capaian Kinerja *Program Kebijakan Administrasi Pembangunan* diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi dengan Target, sedangkan untuk mengukur realisasinya menggunakan formula :

$$\frac{\textit{Kebijakan Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang disusun}}{\textit{Kebijakan Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan}}$$

Capaian Kinerja Program Kebijakan Administrasi Pembangunan untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Sasaran Strategis pada Indikator 2
Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
1	Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah (Pelaksanaan APBD) yang diimplementasikan	117	117	100%

Berdasarkan tabel di atas Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah (Pelaksanaan APBD) yang disusun dan diimplementasikan merupakan indikator utama untuk mengukur apakah Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah sudah sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Indikator ini menilai jumlah persentase regulasi administrasi pembangunan daerah (pelaksanaan APBD) yang disusun secara aktual dan diimplementasikan selama Tahun 2025 dengan Target dan Realisasi Regulasi Administrasi

Pembangunan Daerah (Pelaksanaan APBD) yang disusun dan diimplementasikan selama Tahun 2025 sebanyak 117 Regulasi (Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau) sesuai dengan Target yang telah ditetapkan sehingga Capaian Persentase Regulasi tentang Pelaksanaan APBD yang disusun sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja Jumlah persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun disajikan Tahun 2025 pada Tabel 3.5 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan Biro Perekonomian dan Pembangunan pada tahun sebelumnya telah merubah indikator kinerja pada RPJMD tahun 2025. Pada tahun 2024 berdasarkan RENSTRA 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pada Tahun 2025 telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Adapun Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun dan diimplementasikan dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Ringkasan Kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah Yang diimplementasikan Tahun 2025 Sasaran Strategis Untuk Indikator 2

No.	Ringkasan Kebijakan Administrasi Pembangunan Yang di Susun	Jumlah	Keterangan
1	SK PENGGUNA ANGGARAN	1	
2	SK PERUBAHAN PENGGUNA ANGGARAN	8	
3	SK KUASA PENGGUNA ANGGARAN	34	
4	SK PERUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN	18	
5	SK PPK BIRO	3	
6	SK KPA BIRO	13	
7	SK PPTK BIRO	17	
8	SK PPK DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN	10	
9	SK TARGET FISIK DAN KEUANGAN	1	
10	SK TAPD	1	
11	SK DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI KEPRI	4	

No.	Ringkasan Kebijakan Administrasi Pembangunan Yang di Susun	Jumlah	Keterangan
12	SK REDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1	
13	SK PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGOLAH DATA LAPORAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025	2	
14	SK VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2026	1	
15	SK PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)	1	
16	SK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERARIRAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1	
17	SK ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	1	
JUMLAH		**117**	

Dengan demikian, Capaian Kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal masuk kategori **Baik**.

Adapun Ringkasan Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja sesuai Indikator Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Ringkasan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Kondisi Awal Tahun 2024 Sasaran Strategis

NO	Indikator Kinerja	Kondisi 2025 (%)	Tahun 2025	
			Target	Realisasi
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	100%	100%	100%
2	Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pembandingan antara tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis dan tingkat realisasi anggaran yang digunakan disajikan dalam akuntabiltas keuangan. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Kinerja akan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Tabel 3.8

Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis
Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Anggaran 2025	Realisasi	
				Rp	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	**100%**	**1.696.019.757,25**	**1.578.967.948,00**	**93,10%**
	Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan				

Berdasarkan Tabel 3.8 keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis : Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan dengan tingkat capaian 100% didukung oleh alokasi anggaran sebesar **Rp1.696.019.757,25** dengan realisai anggaran mencapai **Rp1.578.967.948,00** (**93,10%**) melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Alokasi Anggaran sebesar Rp1.201.436.712,25 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.106.911.301,00 (92,13%);

2. Program Perekonomian dan Pembangunan Alokasi Anggaran sebesar Rp351.320.920,00 dengan realisasi sebesar Rp337.295.059,00 (96,01%);
3. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Alokasi Anggaran sebesar Rp143.262.125,00 dengan realisasi sebesar Rp134.761.588,00 (94,07%)

3.4 Analisis Efisiensi

Dari total Alokasi Anggaran Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp1.696.019.757.25** telah direalisasikan sebesar **Rp1.578.967.948,00** atau sebesar **93,10%.** Sedangkan Total Anggaran dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui rekomendasi kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi Kebijakan pada Program Perekonomian dan Pembangunan dan Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan.

Tabel 3.10
Ringkasan Akuntabilitas Keuangan
Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Anggaran 2025	Realisasi		Ket
					Rp.	%	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	100%	1.696.019.757,25	1.578.967.948,00	93,10%	efisien
		Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan	100%				

Berdasarkan data pada Tabel 3.10 dapat disimpulkan bahwa dari 2 indikator kinerja dimana capaian kinerja telah mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan, dengan realisasi anggaran 93,10%. Dengan demikian anggaran yang diserap untuk mencapai kinerja dimaksud adalah efisien.

3.5 Realisasi Anggaran

Dari total belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebesar Rp1.696.019.757,25 dapat direalisasikan sebesar Rp1.578.967.948,00 atau sebesar 93,10%. Tingginya serapan anggaran tahun 2025, dikarenakan dapat melaksanakan Program dan kegiatan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Ringkasan realisasi anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (RP)	Realisasi (%)
1	2025	1.696.019.757,25	1.578.967.948,00	117.051.809,25	93,10%

Pada tahun 2025 realisasi anggaran terbagi dalam 3 program yang sebagaimana pada Tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025
OPD : 4.01.0.00.0.00.22.0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan
Kondisi sampai dengan : 31 Desember 2025

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
1	**4.01.0.00.0.00.22.0005**	**BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**2.835.360.682,00**	**1.696.019.757,25**	**1.578.967.948,00**	**93,10**	**117.051.809,25**	**100,00**
2	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.856.573.634,00**	**1.201.436.712,25**	**1.106.911.301,00**	**92,13**	**94.525.411,25**	**100,00**
3	**4.01.01.1.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**232.997.404,00**	**131.930.833,00**	**123.112.686,00**	**93,32**	**8.818.147,00**	**100,00**
4	**4.01.01.1.01.0005**	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD**	**170.979.404,00**	**99.621.833,00**	**91.644.426,00**	**91,99**	**7.977.407,00**	**100,00**
5	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.816.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-
6	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	667.500,00	1.681.500,00	1.175.750,00	69,92	505.750,00	100,00
7	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.706.200,00	1.194.206,33	1.125.000,00	94,20	69.206,33	100,00
8	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	329.100,00	2.194.000,00	813.200,00	37,06	1.380.800,00	100,00
9	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.230.000,00	9.980.000,00	8.230.000,00	82,46	1.750.000,00	100,00
10	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.100.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	100,00
11	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	62.901.072,00	26.208.780,00	26.182.571,00	99,90	26.209,00	100,00
12	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	35.716.200,00	33.633.000,00	33.300.000,00	99,01	333.000,00	100,00
13	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.919.680,00	1.633.200,00	1.449.470,00	88,75	183.730,00	100,00

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
14	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	235.176,00	97.990,00	86.970,00	88,75	11.020,00	100,00
15	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	293.976,00	122.490,00	108.710,00	88,75	13.780,00	100,00
16	5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	8.658.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	100,00	0,00	100,00
17	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.406.000,00	15.216.666,67	11.512.755,00	75,66	3.703.911,67	100,00
18	**4.01.01.1.01.0006**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**62.018.000,00**	**32.309.000,00**	**31.468.260,00**	**97,40**	**840.740,00**	**100,00**
19	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	1.835.000,00	70,58	765.000,00	100,00
20	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.418.000,00	29.709.000,00	29.633.260,00	99,75	75.740,00	100,00
21	**4.01.01.1.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**357.056.947,00**	**224.740.109,00**	**217.390.273,00**	**96,73**	**7.349.836,00**	**100,00**
22	**4.01.01.1.06.0004**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**97.143.600,00**	**67.703.609,00**	**65.689.803,00**	**97,03**	**2.013.806,00**	**100,00**
23	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	870.000,00	435.000,00	390.000,00	89,66	45.000,00	100,00
24	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.039.700,00	12.479.500,00	11.877.333,00	95,17	602.167,00	100,00
25	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	29.228.700,00	17.709.509,00	17.410.350,00	98,31	299.159,00	100,00
26	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19.400,00	51.100,00	0,00	-	51.100,00	100,00
27	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.692.200,00	13.623.700,00	12.981.870,00	95,29	641.830,00	100,00
28	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.540.000,00	1.450.000,00	1.272.000,00	87,72	178.000,00	100,00
29	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	208.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
30	5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.360.800,00	0,00	0,00	-	0,00	-
31	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.440.800,00	8.530.800,00	8.408.250,00	98,56	122.550,00	100,00
32	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	704.000,00	704.000,00	630.000,00	89,49	74.000,00	100,00
33	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.040.000,00	12.720.000,00	12.720.000,00	100,00	0,00	100,00
34	**4.01.01.1.06.0005**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**32.010.400,00**	**16.847.500,00**	**16.600.280,00**	**98,53**	**247.220,00**	**100,00**
35	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	30.894.400,00	14.809.500,00	14.735.280,00	99,50	74.220,00	100,00
36	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.116.000,00	620.000,00	600.000,00	96,77	20.000,00	100,00
37	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	1.418.000,00	1.265.000,00	89,21	153.000,00	100,00
38	**4.01.01.1.06.0009**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**227.902.947,00**	**140.189.000,00**	**135.100.190,00**	**96,37**	**5.088.810,00**	**100,00**
39	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.470,00	0,00	0,00	-	0,00	-
40	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.775.000,00	14.750.000,00	14.625.000,00	99,15	125.000,00	100,00
41	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.250.000,00	4.950.000,00	0,00	-	4.950.000,00	100,00
42	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.873.477,00	120.489.000,00	120.475.190,00	99,99	13.810,00	100,00
43	**4.01.01.1.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**726.337.876,00**	**442.353.658,00**	**424.047.498,00**	**95,86**	**18.306.160,00**	**100,00**
44	**4.01.01.1.08.0002**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**18.000.000,00**	**22.008.048,00**	**9.901.908,00**	**44,99**	**12.106.140,00**	**100,00**
45	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	2.500.000,00	2.364.908,00	94,60	135.092,00	100,00
46	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	15.057.548,00	3.152.500,00	20,94	11.905.048,00	100,00

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
47	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	4.450.500,00	4.384.500,00	98,52	66.000,00	100,00
48	**4.01.01.1.08.0003**	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**98.500.000,00**	**96.706.200,00**	**96.636.000,00**	**99,93**	**70.200,00**	**100,00**
49	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.990.200,00	706.200,00	636.000,00	90,06	70.200,00	100,00
50	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	509.800,00	0,00	0,00	-	0,00	-
51	5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	0,00	100,00
52	**4.01.01.1.08.0004**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**609.837.876,00**	**323.639.410,00**	**317.509.590,00**	**98,11**	**6.129.820,00**	**100,00**
53	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	576.471.636,00	256.663.650,00	252.158.094,00	98,24	4.505.556,00	100,00
54	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	100,00
55	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	100,00
56	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.397.600,00	11.432.400,00	10.001.343,00	87,48	1.431.057,00	100,00
57	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.763.820,00	685.930,00	600.091,00	87,49	85.839,00	100,00
58	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.204.820,00	857.430,00	750.062,00	87,48	107.368,00	100,00
59	**4.01.01.1.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**135.725.000,00**	**125.557.500,00**	**124.133.826,00**	**98,87**	**1.423.674,00**	**100,00**
60	**4.01.01.1.09.0001**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**117.985.000,00**	**113.337.500,00**	**112.682.376,00**	**99,42**	**655.124,00**	**100,00**
61	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	80.185.000,00	83.201.000,00	83.106.000,00	99,89	95.000,00	100,00

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
62	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.450.000,00	3.800.000,00	3.389.726,00	89,20	410.274,00	100,00
63	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.350.000,00	26.336.500,00	26.186.650,00	99,43	149.850,00	100,00
64	**4.01.01.1.09.0006**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**17.740.000,00**	**12.220.000,00**	**11.451.450,00**	**93,71**	**768.550,00**	**100,00**
65	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000,00	3.050.000,00	2.910.000,00	95,41	140.000,00	100,00
66	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.470.000,00	9.170.000,00	8.541.450,00	93,15	628.550,00	100,00
67	**4.01.01.1.13**	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**404.456.407,00**	**276.854.612,25**	**218.227.018,00**	**78,82**	**58.627.594,25**	**100,00**
68	**4.01.01.1.13.0002**	**Fasilitasi Komunikasi Pimpinan**	**404.456.407,00**	**276.854.612,25**	**218.227.018,00**	**78,82**	**58.627.594,25**	**100,00**
69	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.658.500,00	32.987.500,00	32.885.500,00	99,69	102.000,00	100,00
70	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	348.000,00	348.000,00	0,00	-	348.000,00	100,00
71	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.608.600,00	3.608.600,00	2.883.003,00	79,89	725.597,00	100,00
72	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.663.200,00	1.663.200,00	1.272.000,00	76,48	391.200,00	100,00
73	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	120.050,00	0,00	0,00	-	0,00	-
74	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.929.000,00	2.929.000,00	2.397.600,00	81,86	531.400,00	100,00
75	5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	907.200,00	907.200,00	816.000,00	89,95	91.200,00	100,00
76	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.735.200,00	5.735.200,00	5.477.850,00	95,51	257.350,00	100,00
77	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	844.800,00	844.800,00	756.000,00	89,49	88.800,00	100,00

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
78	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.450.536,00	13.104.390,00	13.104.390,00	100,00	0,00	100,00
79	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.959.840,00	816.600,00	724.735,00	88,75	91.865,00	100,00
80	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	117.588,00	48.995,00	43.485,00	88,75	5.510,00	100,00
81	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	146.988,00	61.245,00	54.355,00	88,75	6.890,00	100,00
82	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	312.966.905,00	157.873.000,00	157.812.100,00	99,96	60.900,00	100,00
83	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	0,00	55.926.882,25	0,00	-	55.926.882,25	100,00
84	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**679.468.996,00**	**351.320.920,00**	**337.295.059,00**	**96,01**	**14.025.861,00**	**100,00**
85	**4.01.06.1.01**	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**169.997.000,00**	**98.168.837,00**	**94.077.770,00**	**95,83**	**4.091.067,00**	**100,00**
86	**4.01.06.1.01.0001**	**Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro**	**77.636.000,00**	**44.608.657,00**	**42.535.980,00**	**95,35**	**2.072.677,00**	**100,00**
87	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.171.200,00	390.000,00	337.000,00	86,41	53.000,00	100,00
88	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	652.200,00	711.300,00	536.600,00	75,44	174.700,00	100,00
89	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	890.940,00	699.097,00	610.000,00	87,26	89.097,00	100,00
90	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	877.600,00	438.800,00	416.000,00	94,80	22.800,00	100,00
91	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.889.600,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	100,00
93	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
94	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.454.460,00	37.369.460,00	35.636.380,00	95,36	1.733.080,00	100,00
95	**4.01.06.1.01.0002**	**Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro**	**92.361.000,00**	**53.560.180,00**	**51.541.790,00**	**96,23**	**2.018.390,00**	**100,00**
96	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.484.600,00	860.900,00	750.000,00	87,12	110.900,00	100,00
97	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.309.500,00	1.309.500,00	1.162.500,00	88,77	147.000,00	100,00
98	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	856.200,00	746.180,00	608.000,00	81,48	138.180,00	100,00
99	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.755.200,00	1.755.200,00	1.664.000,00	94,80	91.200,00	100,00
100	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.688.500,00	7.104.900,00	7.069.590,00	99,50	35.310,00	100,00
101	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	6.400.000,00	6.240.000,00	97,50	160.000,00	100,00
102	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	96,30	100.000,00	100,00
103	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.367.000,00	32.683.500,00	31.447.700,00	96,22	1.235.800,00	100,00
104	**4.01.06.1.02**	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**84.286.952,00**	**44.514.417,00**	**43.947.185,00**	**98,73**	**567.232,00**	**100,00**
105	**4.01.06.1.02.0003**	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air**	**84.286.952,00**	**44.514.417,00**	**43.947.185,00**	**98,73**	**567.232,00**	**100,00**
106	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	678.700,00	313.500,00	263.200,00	83,96	50.300,00	100,00
107	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	588.000,00	518.700,00	430.500,00	83,00	88.200,00	100,00
108	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	849.540,00	679.200,00	610.000,00	89,81	69.200,00	100,00
109	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	877.600,00	877.600,00	832.000,00	94,80	45.600,00	100,00

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
110	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.243.700,00	0,00	0,00	-	0,00	-
111	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	0,00	100,00
112	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
113	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.450.536,00	13.104.390,00	13.025.764,00	99,40	78.626,00	100,00
114	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.959.840,00	816.600,00	724.735,00	88,75	91.865,00	100,00
115	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	117.588,00	48.995,00	43.485,00	88,75	5.510,00	100,00
116	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	146.988,00	61.245,00	54.355,00	88,75	6.890,00	100,00
117	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.674.460,00	23.494.187,00	23.363.146,00	99,44	131.041,00	100,00
118	**4.01.06.1.03**	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**425.185.044,00**	**208.637.666,00**	**199.270.104,00**	**95,51**	**9.367.562,00**	**100,00**
119	**4.01.06.1.03.0001**	**Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha**	**74.552.108,00**	**41.820.117,00**	**40.150.280,00**	**96,01**	**1.669.837,00**	**100,00**
120	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	589.800,00	208.000,00	201.600,00	96,92	6.400,00	100,00
121	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	716.400,00	518.700,00	458.500,00	88,39	60.200,00	100,00
122	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	899.748,00	683.387,00	608.000,00	88,97	75.387,00	100,00
123	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	548.500,00	438.800,00	416.000,00	94,80	22.800,00	100,00
124	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.167.200,00	4.306.000,00	4.284.600,00	99,50	21.400,00	100,00
125	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	97,50	100.000,00	100,00

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
126	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	96,30	100.000,00	100,00
127	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.930.460,00	28.965.230,00	27.681.580,00	95,57	1.283.650,00	100,00
128	**4.01.06.1.03.0002**	**Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi**	**180.840.839,00**	**67.119.928,00**	**65.997.552,00**	**98,33**	**1.122.376,00**	**100,00**
129	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	827.500,00	425.200,00	384.500,00	90,43	40.700,00	100,00
130	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	331.200,00	261.900,00	222.000,00	84,77	39.900,00	100,00
131	5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	77.501,00	7.023,00	0,00	-	7.023,00	100,00
132	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	877.600,00	548.500,00	520.000,00	94,80	28.500,00	100,00
133	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	4.290.000,00	3.960.000,00	92,31	330.000,00	100,00
134	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	125.802.144,00	39.313.170,00	38.962.627,00	99,11	350.543,00	100,00
135	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.839.360,00	2.449.800,00	2.174.205,00	88,75	275.595,00	100,00
136	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	470.352,00	146.985,00	130.455,00	88,75	16.530,00	100,00
137	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	587.952,00	183.735,00	163.065,00	88,75	20.670,00	100,00
138	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.987.230,00	19.493.615,00	19.480.700,00	99,93	12.915,00	100,00
139	**4.01.06.1.03.0003**	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD**	**138.101.831,00**	**81.309.687,00**	**78.406.722,00**	**96,43**	**2.902.965,00**	**100,00**
140	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.256.000,00	1.199.100,00	1.049.750,00	87,54	149.350,00	100,00
141	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.309.500,00	988.500,00	880.000,00	89,02	108.500,00	100,00

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
142	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.141.641,00	1.008.397,00	610.000,00	60,49	398.397,00	100,00
143	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.194.000,00	2.194.000,00	1.976.000,00	90,06	218.000,00	100,00
144	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.840.000,00	9.020.000,00	8.900.000,00	98,67	120.000,00	100,00
145	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00
146	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	0,00	100,00
147	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	2.850.000,00	69,51	1.250.000,00	100,00
148	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93.260.690,00	51.549.690,00	50.890.972,00	98,72	658.718,00	100,00
149	**4.01.06.1.03.0004**	**Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah**	**31.690.266,00**	**18.387.934,00**	**14.715.550,00**	**80,03**	**3.672.384,00**	**100,00**
150	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	905.000,00	905.000,00	0,00	-	905.000,00	100,00
151	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	667.500,00	667.500,00	561.050,00	84,05	106.450,00	100,00
152	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.366,00	26.534,00	0,00	-	26.534,00	100,00
153	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	219.400,00	219.400,00	204.000,00	92,98	15.400,00	100,00
154	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	5.375.000,00	4.750.000,00	88,37	625.000,00	100,00
155	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.389.000,00	11.194.500,00	9.200.500,00	82,19	1.994.000,00	100,00
156	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**299.318.052,00**	**143.262.125,00**	**134.761.588,00**	**94,07**	**8.500.537,00**	**100,00**
157	**4.01.08.1.01**	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**191.708.452,00**	**110.920.207,00**	**106.031.022,00**	**95,59**	**4.889.185,00**	**100,00**

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
158	**4.01.08.1.01.0001**	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD**	**117.936.500,00**	**76.346.749,00**	**72.500.070,00**	**94,96**	**3.846.679,00**	**100,00**
159	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.556.900,00	264.000,00	0,00	-	264.000,00	100,00
160	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
161	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	55.011.600,00	45.843.000,00	44.400.000,00	96,85	1.443.000,00	100,00
162	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.368.000,00	30.239.749,00	28.100.070,00	92,92	2.139.679,00	100,00
163	**4.01.08.1.01.0003**	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah**	**73.771.952,00**	**34.573.458,00**	**33.530.952,00**	**96,98**	**1.042.506,00**	**100,00**
164	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.806.000,00	881.228,00	875.000,00	99,29	6.228,00	100,00
165	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.450.536,00	13.104.390,00	13.078.181,00	99,80	26.209,00	100,00
166	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.959.840,00	816.600,00	724.735,00	88,75	91.865,00	100,00
167	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	117.588,00	48.995,00	43.485,00	88,75	5.510,00	100,00
168	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	146.988,00	61.245,00	54.355,00	88,75	6.890,00	100,00
169	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.291.000,00	19.661.000,00	18.755.196,00	95,39	905.804,00	100,00
170	**4.01.08.1.02**	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**107.609.600,00**	**32.341.918,00**	**28.730.566,00**	**88,83**	**3.611.352,00**	**100,00**
171	**4.01.08.1.02.0003**	**Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah**	**107.609.600,00**	**32.341.918,00**	**28.730.566,00**	**88,83**	**3.611.352,00**	**100,00**
172	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	545.300,00	729.600,00	448.200,00	61,43	281.400,00	100,00
173	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	642.000,00	588.318,00	477.000,00	81,08	111.318,00	100,00
174	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.700,00	0,00	0,00	-	0,00	-

No	Kode	Uraian	Pagu APBD Murni Tahun 2025	Pagu APBD-P Tahun 2025	Realisasi	%	Sisa	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=5-6	9
175	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	657.000,00	507.500,00	77,25	149.500,00	100,00
176	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00	100,00
177	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	75.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
178	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.513.600,00	27.742.000,00	24.672.866,00	88,94	3.069.134,00	100,00
TOTAL			**2.835.360.682,00**	**1.696.019.757,25**	**1.578.967.948,00**	**93,10**	**117.051.809,25**	**100,00**

BAB IV Penutup

4.1. Simpulan

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya rata-rata mencapai hasil dengan baik, yaitu berdasarkan tingkat capaian kinerja menurut indikator kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Skala Ordinal

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2025 (%)	Kategori
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi Kebijakan	100 %	Baik
2	Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan	100%	Baik

Sasaran 1. Meningkatnya Implementasi Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Masuk kategori baik, dimana capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi Kebijakan mencapai 100% dari target yang ditetapkan 100% dan capaian indikator kinerja Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan mencapai 100% dari target yang ditetapkan 100%.

4.2. Saran

Jika dilihat dari Capaian Kinerja rata-rata telah menunjukkan capaian yang baik, namun keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh indikator kinerja utama yang mempresentasikan dokumen Renstra yang telah direviu, relevan, dapat diukur secara obyektif dan memadai. Oleh karena itu diperlukan langkah langkah mempertahankan di tahun-tahun mendatang dengan meningkatkan keandalan sistem pengumpulan data kinerja melalui suatu surat keputusan atau SOP agar target akumulasi capaian kinerja sampai dengan tahun yang ingin dicapai dapat terukur dengan baik lagi.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja

Meskipun capaian kinerja telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, diperlukan strategi guna peningkatan akuntabilitas kinerja pada Biro Perekonomian dan Pembangunan, antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan asistensi dengan pemangku kepentingan, Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perekonomian dan pembangunan;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan Perekonomiaan dan pembangunan;
3. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan Perekonomian dan Pembangunan;
4. Memanfaatkan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan tugas pegawai secara selektif;
5. Menganalisa kebutuhan jumlah pegawai dalam melaksanakan tupoksi;
6. Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
7. Melakukan rapat koordinasi antar Biro dalam rangka pengumpulan data dan informasi.

LAKIP Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan dalam rangka pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja, yang dengan penuh tantangan tetap dapat terlaksana dengan cukup baik. Berkat Ridho ALLAH SWT, pencapaian dua indikator kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Walaupun demikian, setiap pencapaian perlu dilakukan evaluasi, agar mendapat *feedback* guna perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, juga untuk mengetahui lebih dini terhadap hal-hal yang dianggap dapat mengakibatkan tidak tercapainya target, agar dibuatkan inisiatif strategis yang akan mengarahkan tercapainya target.

Dengan disusunnya LAKIP Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pimpinan maupun kepada seluruh pihak (*stakeholders*) yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, diharapkan juga adanya *feedback* atau umpan balik agar hasil (*outcomes*) yang diharapkan dari setiap program dapat memberikan dampak yang baik bagi *stakeholders* dan *customers* Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi sehingga apa yang telah dicita-citakan dapat diwujudkan.

Lampiran-Lampiran

Lampiran I	Perjanjian Kinerja Perubahan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025
Lampiran II	Rekapitulasi Laporan Realisasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025